



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018-2023**



**BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya selesailah penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023.

Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023.

Disadari bahwa selesainya penulisan naskah akademik ini dikarenakan adanya bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih.

Harapan dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini, dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 ayat (3) dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka penyempurnaan naskah akademik ini, baik dari segi materi maupun teknis penulisannya. Dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran dan masukan untuk penyempurnaan dokumen ini

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode	5
E. Sistematika	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoretis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait	9
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	9
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi	10
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	12
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	14
A. Landasan Filosofis	14
B. Landasan Sosiologis	16
C. Landasan Yuridis	17
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	20
BAB VI PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya juga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dapat selesai. Naskah Akademik ini disusun bekerjasama dengan 3 orang Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu H.Usmawadi, SH, MH, Dedeng, SH, MH dan Ahmad Idris, SH, MH, yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3387/SK/Nakertrans/2018 tanggal 18 Desember 2018 (Keputusan Tim penyusun terlampir).

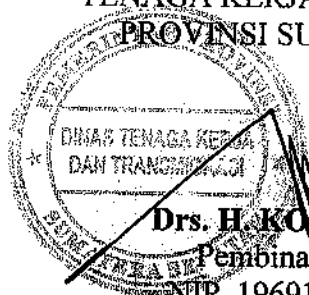
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga kerja lokal bertujuan untuk memberikan landasan teori / akademis terhadap materi hukum dan norma hukum sehingga nantinya penyerapan tenaga kerja lokal yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan yang merupakan pengangguran tertinggi dapat terserap oleh pasar kerja.

Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Penyusun Naskah Akademik yang telah memberikan masukan dalam rangka penyelesaian naskah akademik tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melalui Peraturan Daerah yang bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dalam kehidupan masyarakat serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kewenangan berkaitan dengan tenaga kerja.

Demikian, semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait untuk menjadi rujukan proses selanjutnya.

Palembang, Desember 2018

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. KOIMUDIN, SH, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19691208 199603 1 001

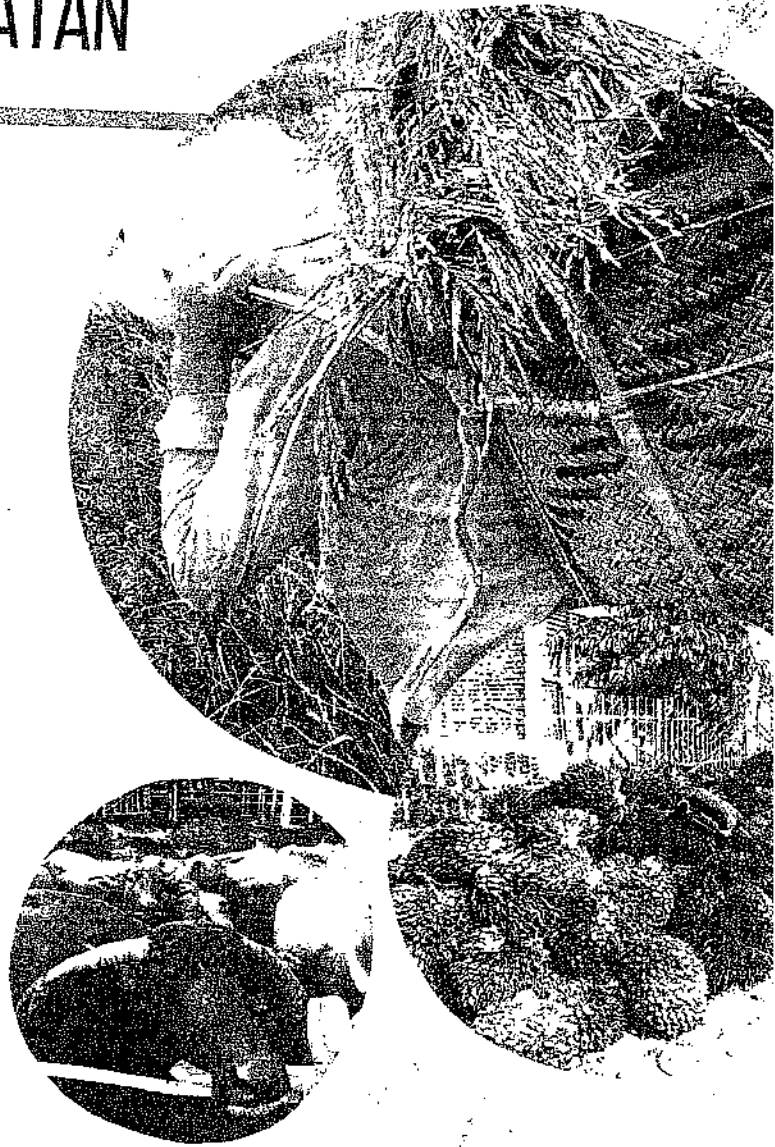
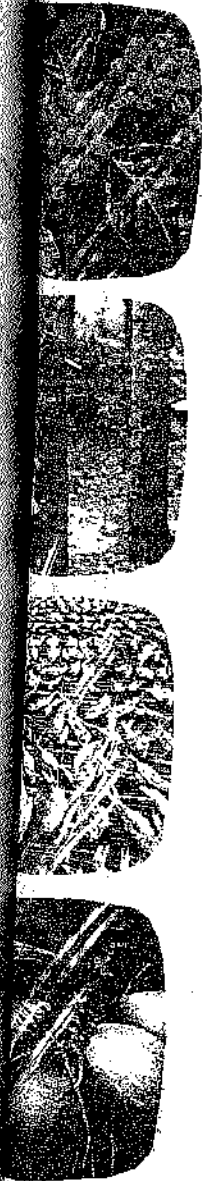
DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis.....	4
D. Metode.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	7
A. Kajian Teoritis.....	7
1. Tenaga Kerja.....	9
2. Klasifikasi Tenaga Kerja.....	10
3. Kesempatan Kerja.....	12
4. Penerapan Tenaga Kerja.....	14
B. Kajian Empiris.....	15
1. Keadaan Ketenagakerjaan di Sumatera Selatan.....	15
a. Angkatan Kerja.....	15
b. Pengangguran.....	16
c. Penduduk Bekerja.....	18
2. Implikasi Pemberdayaan dan Penempatan TKL.....	21
a. Pemerintah Sumatera Selatan.....	22
b. Perusahaan atau pemberi kerja.....	23
c. Tenaga Kerja Lokal.....	24
C. Kajian Asas-asas.....	25
1. Asas keterbukaan.....	26
2. Asas Keadilan.....	27
3. Asas Kepastian Hukum.....	27
4. Asas Manfaat.....	28
5. Asas Kemitraan.....	28
BAB III EVALUASI TERHADAP UNDANG-UNDANG TERKAIT KEWENANGAN DAERAH DAN KETENAGAKERJAAN..	30
A. Undang-Undang Terkait Kewenangan Daerah.....	30
B. Undang-Undang Terkait Ketenagakerjaan.....	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	51
A. Landasan Filosofis	51
B. Landasan Sosiologis	51
C. Landasan Yuridis.....	54

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	58
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	58
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	58
1. Kerangka dan Ruang Lingkup.....	58
2. Materi Muatan Yang diatur Dalam Batang Tubuh.....	59
C. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	63
D. Ketentuan Peralihan	68
E. Ketentuan Penutup.....	68
 BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA.....	71
 LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

BUKUH AKADEMIK

PERENCANAAN PERATURAN DAERAH UNTUK MEMBENTUKAN BUMD SEKTOR AGRIBISNIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



KERJASAMA
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
dengan
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

2019

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Identifikasi Masalah.....	I-4
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	I-4
1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	I-4
1.3.2. Kegunaan Penyusunan Peraturan Daerah.....	I-5
1.4. Metode Penelitian.....	I-5
1.5. Jadwal Kegiatan.....	I-6
1.6. Sistematika Naskah Akademik.....	I-6
II. KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS.....	II-1
2.1. Kajian Teoritis.....	II-1
2.1.1. Teori tentang Badan Usaha dan Keuangan Daerah.....	II-1
2.1.2. Teori Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	II-3
2.1.3. Permasalahan Pada Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah).....	II-6
2.1.4. Teori Tentang Good Corporate Governance (GCG).....	II-10
2.1.5. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	II-12
2.1.6. Teori tentang Investasi (Penanaman Modal).....	II-13
2.1.7. Teori tentang Saham.....	II-15
III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	III-1
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	III-1
3.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.....	III-2
3.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	III-3
3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.....	III-4

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perbedaan antara Badan Usaha dan Perusahaan.....	II-1
Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), 2013-2017.....	II-17
Tabel 2.3. Luas Lahan dan Produksi dari Komoditi-Komoditi Unggulan di Sumatera Selatan, 2017.....	II-19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BUMD Sektor Agribisnis.....

Halaman:

II-20